

Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>**WINDRADI**ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i1.374>

Pendampingan dan Pelatihan Penggunaan E-Government Pada Pelayanan Publik Di Kelurahan Malalayang Satu Barat Kota Manado

Jericho D. Pombengi¹, Johny Hanny Posumah², Jones Tompodung³

¹⁻³Universitas Sam Ratulangi

*Corresponding Author: jdpombengi@gmail.com

ARTICLE INFORMATION

Received: August 27th, 2025
 Revised: Sept 02th, 2025
 Accepted: Sept 04th, 2025
 Available online: Sept 04th, 2025

KEYWORDS

e-Government, information and communication technology, public service, digital literacy, social capital

KATA KUNCI

e-Government, teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan publik, literasi digital, modal sosial

ABSTRACT

The utilization of information and communication technology (ICT) in public administration is a strategic step to promote good governance. Since the issuance of Presidential Instruction No. 6 of 2001 on Telematics, the Indonesian government has encouraged the implementation of e-Government across various regions. However, its application at the village level still encounters several challenges, including limited community understanding, low digital literacy, and inefficiencies in public service delivery. This community engagement program was conducted in Malalayang Satu Barat Village, Manado City, North Sulawesi, with the primary goal of enhancing public awareness of e-Government as a tool for service digitalization. The methods applied included needs assessment surveys, counseling, mentoring, and participatory training involving local residents. The results indicate improved community understanding of e-Government, particularly in accessing information, reducing dependence on direct visits to the village office, and fostering awareness of environmental management and public health issues. The benefits of the program extend beyond digital literacy improvement, contributing to the strengthening of social capital and encouraging active community participation. These findings highlight the significance of community-based approaches in supporting the effective implementation of e-Government at the local level.

ABSTRAK

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika, pemerintah Indonesia berupaya mendorong penerapan e-Government di berbagai daerah. Namun, implementasi di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat, rendahnya literasi digital, serta persoalan pelayanan publik yang belum efisien. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kota Manado, Sulawesi Utara, dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan e-Government sebagai sarana digitalisasi layanan. Metode yang digunakan meliputi survei



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

WINDRADI

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i1.374>



kebutuhan, penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan partisipatif bersama mitra masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep e-Government, terutama dalam mengakses informasi, mengurangi ketergantungan pada kunjungan langsung ke kantor kelurahan, serta memperbaiki kesadaran terkait isu pengelolaan lingkungan dan kesehatan publik. Manfaat yang diperoleh dari program ini tidak hanya berupa peningkatan literasi digital, tetapi juga penguatan modal sosial dalam membangun partisipasi aktif masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam mendukung implementasi e-Government di tingkat lokal.

PENDAHULUAN

Kota Manado adalah ibu kota dari provinsi Sulawesi Utara. Kota Manado seringkali disebut sebagai Manado. Manado terletak di Teluk Manado, dan dikelilingi oleh daerah pegunungan. Kota ini memiliki 408.354 penduduk pada Sensus 2010, menjadikannya kota terbesar kedua di Sulawesi setelah Makassar. Saat ini mayoritas penduduk kota Manado berasal dari suku Minahasa, karena wilayah Manado merupakan berada di tanah/daerah Minahasa. Penduduk asli Manado adalah sub suku Tombulu dilihat dari beberapa nama kelurahan di Manado yang berasal dari bahasa Tombulu, misalnya: Wenang (Pohon Wenang/Mahawenang bahan pembuat kolintang), Tumumpa (turun), Mahakeret (Berteriak), Tikala Ares (Walak Ares Tombulu, di mana kata 'ares' berarti dihukum), Ranotana (Air Tanah), Winangun (Dibangun), Wawonasa (wawoinasa – di atas yang diasah), Pinaesaan (tempat persatuan), Pakowa (Pohon Pakewa), Teling (Bulu/bambu untuk dibuat peralatan), Titiwungen (yang digali), Tuminting (dari kata Ting-Ting: Lonceng, kata sisipan -um- berarti menunjukkan kata kerja, jadi Tuminting: Membunyikan Lonceng), Pondol (Ujung), Wanea (dari kata Wanua: artinya negeri), dll.; sedangkan daerah Malalayang adalah suku Bantik, suku bangsa lainnya yang ada di Manado saat ini yaitu suku Sangir, suku Gorontalo, suku Mongondow, suku Arab, suku Babontehu, suku Talaud, suku Tionghoa, suku Siau dan kaum Borgo. Karena banyaknya komunitas peranakan arab, maka keberadaan Kampung Arab yang berada dalam radius dekat Pasar '45 masih bertahan sampai sekarang dan menjadi salah satu tujuan wisata



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

WINDRADI

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i1.374>



agama. Selain itu terdapat pula penduduk suku Jawa, suku Batak, suku Makassar dan suku Minangkabau Suku Aceh.

Organisasi di seluruh dunia harus melakukan inovasi strategi agar tidak terlindas oleh pesaing. Selain itu, melakukan inovasi strategi bisa memperoleh keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaing (Friedman dan George, 2010). Inovasi strategi yang paling tepat untuk memperoleh keunggulan kompetitif adalah dengan cara penataan ulang organisasi, dengan melibatkan manfaat dari sistem informasi dan teknologi terhadap proses yang ada dalam organisasi (Hammer dan Champy, 1993). Inovasi berhubungan dengan Informatika dan Teknologi khususnya internet (Richard Heeks, 2005): a). Manfaat pada proses, yaitu menghemat biaya transaksi akses informasi pemerintah, b). Menghemat waktu, yaitu mempercepat proses internal dan proses pertukaran data dengan instansi lainnya, c). Mengurangi keterbatasan yakni dimanapun dan kapanpun informasi layanan pemerintah dapat akses oleh masyarakat, d). Keputusan yang lebih baik, yakni pemimpin dapat mengontrol kinerja stafnya, mengontrol kegiatan, ataupun mengontrol kebutuhan.

Sistem informasi dan teknologi, tidak hanya berperan sebagai suatu dukungan semata, namun juga telah berperan sebagai key operational, high potential, peran strategis dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam sebuah organisasi (Wheelan dan Hunger, 2004). E-government secara umum dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah, yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan penyampaian layanan (Forman, 2005). e-government diharapkan pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih baik, efektivitas internal organisasi pemerintahan semakin meningkat dan akses masyarakat terhadap informasi dalam lingkungan pemerintahan semakin mudah (Kase, 2010). Hartono (2010) e-government merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (Information, Communication and Technology) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan lembaga pemerintah serta stafnya. Hole (2011) *e-government* sebenarnya adalah bagaimana



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

WINDRADI

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i1.374>



memberikan pelayanan melalui elektronik (e-services), seperti melalui internet, jaringan telepon seluler dan komputer serta multimedia.

Permasalahan yang dihadapi Mitra kelurahan Malalayang Satu Barat yaitu belum tersedia website kelurahan Malalayang Satu Barat dalam melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas sehingga agak sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi apalagi dalam hal mengurus surat surat keterangan atau perijinan lainnya yang harus mengerjakan secara manual, Rendahnya informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan tidak adanya media website kelurahan, Pemerintah kelurahan tidak menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Informasi yang ditampilkan lebih bervariasi seperti fasilitas download dan komunikasi email dalam situs web pemerintah kelurahan, Kurang dilengkapi fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah; belum tersedia pelayanan pemerintah secara terintegrasi

METODE

Metode Pelaksanaan

Membiasakan untuk penggunaan e-government sebagai media informasi pelayanan publik dengan memberikan pengertian betapa bermanfaatnya ketika seluruh kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat dilihat dan bertransaksi dalam website kelurahan Malalayang Satu Barat. Menentukan hanya ada satu admin dalam group tersebut nantinya dapat mengontrol seberapa jauh program pemerintah yang sudah direalisasikan atau yang belum direalisasikan.

Adapun metode pelaksanaan yang akan di terapkan pada Program Kemitraan Masyarakat yakni memberikan pelatihan dan pendampingan. Tujuan metode ini ialah untuk menyadarkan masyarakat dan aparat pemerintah tentang pentingnya Pendampingan dan Pelatihan Penggunaan E-Government Pada Pelayanan Publik Di Kelurahan Malalayang Satu Barat. Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

WINDRADI

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i1.374>



Pelatihan

Pelatihan yang diberikan kepada aparat Kelurahan Malalayang Satu Barat diawali dengan tutorial penggunaan e-Government dalam pelayanan publik. Tujuan dari tahap ini adalah memberikan pemahaman praktis mengenai cara memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat, mempermudah, dan mengefisienkan layanan administrasi. Aparat diperkenalkan pada fitur-fitur dasar seperti sistem pengarsipan elektronik, penyampaian informasi publik, dan pengelolaan data kependudukan berbasis digital. Dengan bekal ini, aparat diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tata kelola pelayanan yang semakin mengandalkan teknologi informasi (Indrajit, 2002).

Selain itu, penggunaan *e-Government* diyakini dapat meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Melalui platform digital, masyarakat dapat mengakses informasi secara terbuka tanpa perlu bergantung pada prosedur birokrasi yang panjang. Hal ini sejalan dengan pandangan Chung (2015) bahwa teknologi informasi mendorong keterbukaan dalam interaksi antara pemerintah dan warga. Transparansi tersebut menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu bentuk pelatihan yang diberikan adalah pembuatan website resmi Kelurahan Malalayang Satu Barat. Website tersebut dirancang sebagai pusat informasi yang dapat diakses masyarakat terkait layanan administrasi, pengumuman, hingga kegiatan pembangunan. Dengan adanya media digital ini, pemerintah kelurahan memiliki sarana untuk menyebarkan informasi secara cepat, murah, dan terukur. Website juga berfungsi sebagai sarana komunikasi timbal balik antara warga dengan aparat kelurahan, sehingga tercipta pola pelayanan yang lebih responsif (Napitupulu, 2014).

Lebih jauh, pelatihan juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat melalui partisipasi aktif warga. Aparat dilatih dalam membangun komunikasi digital yang efektif, terutama dalam menyelesaikan persoalan keamanan, ketertiban, serta kebutuhan pelayanan sehari-hari. Dengan platform digital, pengaduan masyarakat dapat ditangani lebih cepat dan terintegrasi dengan pihak berwenang. Upaya



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

WINDRADI

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i1.374>



ini diharapkan mampu memperkuat modal sosial dalam menjaga kohesi sosial dan keamanan lingkungan (Putnam, 2000).

Dari sisi manajemen, pelatihan juga membekali aparat kelurahan mengenai tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam pemanfaatan teknologi digital. Aparat diajarkan menyusun perencanaan strategis agar pemanfaatan e-Government dapat berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, pengawasan secara rutin diperlukan untuk memastikan sistem tetap berfungsi optimal dan tidak menimbulkan masalah baru, seperti kebocoran data atau rendahnya pemanfaatan aplikasi oleh masyarakat. Manajemen yang baik menjadi kunci agar transformasi digital benar-benar memberi manfaat nyata (Terry, 2009).

Aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian dalam pelatihan ini. Aparat kelurahan tidak hanya dituntut mampu menggunakan sistem digital, tetapi juga menjaga agar pemanfaatan teknologi ini dapat bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengelolaan sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta peningkatan keterampilan secara berkesinambungan. Dengan langkah tersebut, e-Government di Kelurahan Malalayang Satu Barat diharapkan tidak hanya menjadi proyek sementara, tetapi bagian integral dari sistem pelayanan (Heeks, 2006).

Akhirnya, pelatihan ini merupakan langkah penting dalam membangun kapasitas kelembagaan di tingkat kelurahan. Dengan adanya peningkatan keterampilan aparat dalam memanfaatkan e-Government, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih efektif, transparan, dan partisipatif. Selain itu, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari layanan berbasis digital, baik dalam hal kemudahan mengakses informasi maupun kecepatan pelayanan. Transformasi ini selaras dengan upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital di seluruh Indonesia (Dwiyanto, 2018).

Pendampingan

Pendampingan yang dilakukan kepada mitra difokuskan pada aspek penggunaan e-Government dengan baik dan benar. Aparat kelurahan diberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar pemanfaatan teknologi digital, mulai dari tata cara



mengakses aplikasi hingga mengelola data pelayanan masyarakat. Tujuan utama dari pendampingan ini adalah memastikan bahwa setiap aparaturnya mampu menjalankan peran mereka secara optimal dalam mendukung transformasi digital di tingkat kelurahan.

Selain pemahaman teknis, pendampingan juga mencakup aspek pengawasan terhadap penggunaan e-Government. Hal ini penting agar sistem yang dibangun benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya sekadar formalitas. Melalui pengawasan, aparat dapat mendeteksi hambatan sejak dini, seperti rendahnya partisipasi masyarakat atau kendala teknis yang muncul dalam penggunaan sistem digital. Dengan demikian, perbaikan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Lebih jauh, pendampingan ini diarahkan untuk mengoptimalkan pelayanan publik setiap hari melalui pemanfaatan e-Government. Aparat kelurahan diajarkan bagaimana menjaga konsistensi pelayanan, sehingga masyarakat merasakan manfaat langsung dari layanan berbasis digital. Kehadiran e-Government tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga mendorong transparansi serta akuntabilitas pemerintah kelurahan. Dengan pendampingan yang berkesinambungan, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat seiring dengan berkembangnya literasi digital di masyarakat.

Evaluasi

Evaluasi akan dilakukan selama 2 bulan dengan memonitor penggunaan website kelurahan Malalayang Satu Barat terkait sejauhmana program pemerintah atau informasi penting lainnya sudah diketahui oleh masyarakat melalui website. Dan juga apakah terjadi komunikasi antara aparat pemerintah dengan masyarakat sehubungan dengan keluhan masyarakat tentang pelayanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan

Untuk memanfaatkan e-government secara efektif dan efisien, sangat penting untuk memahami beberapa elemen penting yang bertanggung jawab atas penerapan sistem tersebut. Ini adalah prosedur dan taktik yang dapat digunakan:



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

WINDRADI

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i1.374>



1. Memahami Konsep E-Government: E-government, juga dikenal sebagai pemerintahan elektronik, adalah suatu konsep yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk menyediakan berbagai layanan dan informasi kepada masyarakat. Ini mencakup interaksi antara pemerintah dan rakyat (G2C), pemerintah dan bisnis (G2B), dan pemerintah dan lembaga (G2G).
2. Tahapan Penerapan E-Government Proses penerapan e-government dapat dibagi menjadi beberapa tahapan:
 - a. Tingkat Persiapan: Menciptakan situs informasi, menyiapkan sumber daya manusia (SDM), dan memberikan sarana akses yang mudah. - Tingkat Pematangan: Menciptakan situs yang interaktif dan berhubungan dengan lembaga. - Tingkat Pemantapan: Menciptakan situs transaksi pelayanan publik dan interoperabilitas aplikasi. - Tingkat Pemanfaatan: Mengoptimalkan penggunaan layanan e-government oleh masyarakat dan bisnis.
3. Strategi Pengembangan E-Government: Ada sejumlah strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan e-government yang efektif, seperti: pengembangan sistem pelayanan yang Andal: membuat sistem yang terpercaya dan terjangkau bagi masyarakat; optimalisasi teknologi informasi: menjamin keamanan transaksi dan penyampaian informasi yang lengkap; peningkatan kapasitas sumber daya manusia: mendidik karyawan pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru; dan partisipasi dunia internasional:
4. Menciptakan Interaksi Dua Arah: E-government harus memungkinkan masyarakat dan pemerintah berbicara satu sama lain secara dua arah. Ini dapat dicapai melalui polling, forum online, atau media sosial untuk memberikan masukan terhadap kebijakan publik.
5. Komitmen pemimpin dan infrastruktur dukungan penting untuk keberhasilan implementasi e-government. Selain itu, infrastruktur yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat keras, sangat penting.
6. Keamanan Data



- b. Pengelolaan e-government harus memperhatikan aspek keamanan data untuk melindungi informasi pribadi masyarakat dari ancaman siber.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, e-government dapat diimplementasikan secara efektif, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel dapat dicapai melalui penggunaan platform digital dalam e-government. Berikut adalah beberapa poin penting yang mendukung pernyataan tersebut:

1. Transparansi Melalui Keterbukaan Informasi

Penggunaan teknologi informasi memungkinkan pemerintah untuk menyediakan informasi yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya platform digital, warga dapat dengan cepat mengakses data terkait kebijakan, anggaran, dan laporan kinerja pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat.

2. Efektivitas dalam Pelayanan Publik

E-government meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan memungkinkan transaksi dan pengajuan layanan secara online. Ini mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan, serta mempercepat proses administrasi. Misalnya, sistem e-procurement memungkinkan masyarakat untuk memantau pengadaan barang dan jasa secara transparan, sehingga mengurangi potensi penyimpangan.

3. Akuntabilitas Melalui Partisipasi Publik

Platform digital mendukung interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya mekanisme pengaduan online, masyarakat dapat melaporkan masalah atau memberikan masukan secara langsung kepada pemerintah. Ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari publik dalam pengawasan kinerja pemerintah.



4. Pengembangan Infrastruktur Digital

Untuk mencapai tujuan tersebut, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur digital yang memadai. Ini mencakup jaringan internet yang cepat dan aman serta sistem manajemen data yang efisien. Pelatihan bagi pegawai pemerintah juga diperlukan agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan optima

5. Keamanan Data dan Privasi

Aspek keamanan data harus menjadi prioritas dalam penerapan e-government. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi pribadi masyarakat terlindungi dari ancaman siber dan penyalahgunaan. Penggunaan teknologi seperti blockchain dapat membantu menjaga integritas dan keamanan data.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, e-government dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di era digital ini.

Pendampingan

Pelatihan pembuatan website untuk kelurahan dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah dan strategi yang efektif. Berikut adalah panduan yang dapat digunakan:

1. Tujuan dan Manfaat Website Kelurahan

Sebelum memulai, penting untuk menetapkan tujuan dari pembuatan website.

Website kelurahan dapat berfungsi untuk:

- Menyediakan informasi penting bagi masyarakat.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kelurahan.
- Memfasilitasi komunikasi antara warga dan pemerintah.

2. Memilih Platform yang Tepat

Pilih platform yang sesuai untuk membangun website. Beberapa opsi yang populer meliputi:

- WordPress: Cocok untuk pengguna yang ingin banyak kustomisasi dengan berbagai plugin.
- Wix: Menawarkan kemudahan dalam desain tanpa perlu keterampilan coding.



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

WINDRADI

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i1.374>



- Mighty Networks: Baik untuk membangun komunitas dengan fitur interaksi yang kuat.

3. Desain dan Struktur Website

Desain website harus menarik dan mudah dinavigasi. Beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan:

- Halaman Utama: Menampilkan informasi terbaru dan navigasi yang jelas.
- Halaman Informasi: Menyediakan data tentang layanan publik, berita kelurahan, dan kontak.
- Fasilitas Interaksi: Menyediakan formulir pengaduan atau saran bagi masyarakat.

4. Konten yang Relevan

Pastikan konten website selalu diperbarui dan relevan. Ini termasuk:

- Berita terkini dari kelurahan.
- Informasi tentang acara atau kegiatan masyarakat.
- Panduan penggunaan layanan publik.

5. Pelatihan SDM

Melibatkan pegawai kelurahan dalam pelatihan pembuatan dan pengelolaan website sangat penting. Pelatihan ini bisa mencakup:

- Cara menggunakan platform yang dipilih.
- Teknik penulisan konten yang baik dan informatif.
- Manajemen data dan keamanan informasi.

6. Sosialisasi kepada Masyarakat

Setelah website diluncurkan, lakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tahu cara mengakses dan memanfaatkan website tersebut. Ini bisa dilakukan melalui:

- Pengumuman di acara kelurahan.
- Media sosial.
- Leaflet atau brosur.



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

WINDRADI

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i1.374>



7. Evaluasi dan Perbaikan

Lakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan website, termasuk feedback dari masyarakat. Ini penting untuk memperbaiki fitur atau konten yang kurang efektif.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pelatihan pembuatan website untuk kelurahan dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Kesimpulan

Kegiatan pendampingan di Kelurahan Mallyang Satu Barat Kecamatan Malalayang masih berfokus pada pengembangan sistem informasi kelurahan. Melalui pelatihan dan pengembangan website, namun masih terkendala dalam fasilitas perangkat penunjang akan tetapi untuk perangkat kelurahan dilatih untuk mengelola platform digital tersebut, yang mencakup fitur pelayanan publik dan pengelolaan data kelurahan. Hasil dari pelatihan menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman perangkat kelurahan mengenai website dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

E-government memberikan banyak manfaat bagi pemerintah kelurahan antara lain:

Meningkatkan partisipasi masyarakat; masyarakat lebih terlibat dalam pengambilan keputusan melalui akses informasi yang lebih baik. Meningkatkan transparansi; masyarakat dapat mengakses informasi lebih mudah. Meningkatkan akuntabilitas; proses yang lebih terbuka mengurangi kemungkinan korupsi.

Dengan pendampingan dan pelatihan yang tepat, pemerintah kelurahan Malayanag Satu dalam menerapkan e-government yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberdayakan masyarakat di era digital saat ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Chung, C. S. (2015). The introduction of e-Government in Korea Development journey, outcomes and future. *Gestion et Management Public* vol. 3 (no. 4).
- Forman, C. (2005). The corporate digital divide: Determinants of Internet adoption. *Management Science*, 51(4), 641-654.
- Hartono, D. U., & Mulyanto, E. (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi*, 6(1), 9-21.
- https://manadokota.go.id/site/selayang_pandang
- Kase, J. D. (2010). Perencanaan Strategis Sistem Informasi pada Pemkab Timor Tengah Selatan (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Rachmawati, Y., Ma'arif, M., Fadhillah, N., Inayah, N., Ummah, K., Siregar, M., ... & Auliyah, A. (2020). Studi eksplorasi pembelajaran pendidikan IPA saat masa pandemi covid-19 di UIN Sunan Ampel Surabaya. *Indonesian Journal of Science Learning*, 1(1), 32-36.
- Rudianto, R., Permana, B. R. S., Hamdan, H., & Ardiyansah, A. (2023). Pengembangan pembelajaran guru sekolah menengah atas (SMA) melalui pemanfaatan multimedia yang menarik dan efektif di SMA Entrepreneurship Bi'ru'ul Ulum Serang. *WINDRADI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-5.
- Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Wheelan, T. L., & Hunger, J. D. (2004). *Concept in strategic management and business policy*. Pearson Education: London, UK, 110.
- Yani, A. (2018). Pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(1), 97-102.